

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali Chomzah. *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*.
(Bandung: Mandar Maju, 1990.)

Asshiddigie Jimly. *Teori Hans Tentang Hukum*. (Jakarta: Konstitusi
Press, 2006.)

Bakhrul Amal. *Pengantar. Hukum Tanah Nasional Sejarah, Politik,
Dan Perkembangannya*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2017.)

Br Sitompul Verawati. *Buku Mengajar Hukum Perdata*. (Jakarta: PT.
Pustaka Mandiri, 2017.)

Departemen Penerangan dan Direktorat Jenderal Agraria Departemen
Dalam Negeri. *Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia*.
(Jakarta: Direktorat Publikasi Ditjen PPG Departemen Penerangan dan
Ditjen Agraria Depdagri, 1982.)

Gunanegara. *Hukum Pidana Agraria Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana*. (Jakarta: Pt. Tstanusa, 2017.)

Kartasapoetra. *Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.)

Rubaeie Achmad. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. (Malang: Bayumedia, 2007.)

Raharjo Soetjipto. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1983.)

Harsono Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2002.)

Harsono Boedi. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2002.)

Perangin Effendi. *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1991.)

Perangin Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1989.)

Subekti. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Intermasa, 2003.)

Santoso Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.)

Iskandar Mudakir. *Panduan Mengurus Sertifikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2019.)

Sitorus Oloan dan Nmadyawati. *Hak Atas Tanah dan Kondominium*. (Jakarta: Dasamedia Utama, 1994.)

Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum*. (Yogyakarta: Pada Penulis, 2010.)

Hadjon Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987.)

Parlindungan. *Konversi Hak – Hak Atas Tanah*. (Bandung: Mandar Maju, 1990.)

Parlindungan. *Komentari Atas Undang – Undang Pokok Agraria*. (Bandung: Alumi, 1986.)

Parlindungan. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, (Bandung: Mandar Maju, 1989.)

Rukhiyat Eddy. *Politik Pertahanan Nasional Sampai Orde Reformasi*. (Bandung: Alumi, 1999.)

Saleng Abar. *Hukum Pertambangan*. (Yogyakarta: UII Press. 2004.)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.)

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.)

Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.)

Yulianto. Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Jaminan Kredit Perbankan. (Jakarta: Mitra Usaha Abadi, 2004.)

B. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Indonesia. Undang – Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan – Perusahaan Milik Belanda Yang Berada di Dalam Wilayah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Pertanggung Djiwa Milik Belanda Jang Dikenakan Nasionalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2098).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penentuan Perusahaan Asuransi Kerugian Milik Belanda Yang Dikenakan Nasionalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1928).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643).

Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok – Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak – Hak Barat.

Indonesia, Peraturan Pmenteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan – Ketentuan Mengenai Permohonan Dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak – Hak Barat.

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Bererapa Ketentuan UUPA.

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria/ BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

C. Jurnal Hukum

Suparman. *Peranan Undang – Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat Indonesia yang Bersifat Agraris*. Jurnal Warta, No. 3, Oktober 2017.

Asana Ulfia. *Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria Dihubungkan Dengan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3. No. 1.

Imanda Nadia. *Lahirnya Hak Tanggungan Menurut Peraturan Pemerintah Agraria Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3. No. 1. Februari 2020.

D. Makalah

Nasution Agussalam. “*Teori Hukum Pertanahan Yang Pernah Berlaku Di Indonesia*”. Majalah Hukum Agraria. Tahun 2012.

S.W. Maria “*Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Tanah*” Makalah, Seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak – pajak yang Terkait: Suatu Proses Sosialisasi dan Tantangannya, kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Badan Pertanahan Nasional. Tahun 1997.

E. Koran

Anonim. “*Pelepasan Tanah Diminta Dipercepat*”, Kompas 5 Mai 2019.

F. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa (Edisi Keempat). PT. Gramedia Jakarta.

G. Internet

<http://www.landpolicy.or.id> (14 Oktober 2009 pukul 1830 WIB.)

Kompas.com, Sengketa Tanah Antara Pererangan Tembus 6071 Kasus,Sumber:<https://properti.kompas.com/read/2018/12/18/125954021/sengketa-tanah-antar-perorangantembus-6071-kasus>, (18 juli 2020.)

Okezone, Ada 8.959 Sengketa Lahan Terbanyak Konflik Antar Masyarakat,sumber:[https://economy.okezone.com/read/2019/05/03/470/2051073/ada-8-959-sengketa-lahan-terbanyak-konflik-anatar masyarakat](https://economy.okezone.com/read/2019/05/03/470/2051073/ada-8-959-sengketa-lahan-terbanyak-konflik-anatar-masyarakat).